



**DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

**DISKUSI PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN  
KEAHLIAN DPR RI  
“Mengejar Keteringgalan Daerah Tertinggal”**

OLEH:

ABDUL WAHID, SH., M.SI.  
DIREKTUR PERENCANAAN DAN IDENTIFIKASI DAERAH TERTINGGAL  
DITJEN PDT-KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

Kesenjangan Antara Daerah Maju Dengan Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal secara khusus, terencana, sistematis, dan berkelanjutan

UU No.17/2007 ttg RPJPN 2005-2025

Perlunya prioritas pembangunan kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal dan keberpihakan yang besar dari pemerintah

Perpres No.2/2015 ttg RPJMN 2015-2019

PP No.78/2014 ttg PERCEPATAN PDT

**VISI:**

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

**NAWACITA KE-3:**

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

**PPDT bertujuan untuk:**

- mempercepat pengurangan kesenjangan antardaerah
- mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal;
- meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi,
- menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan PPDT.

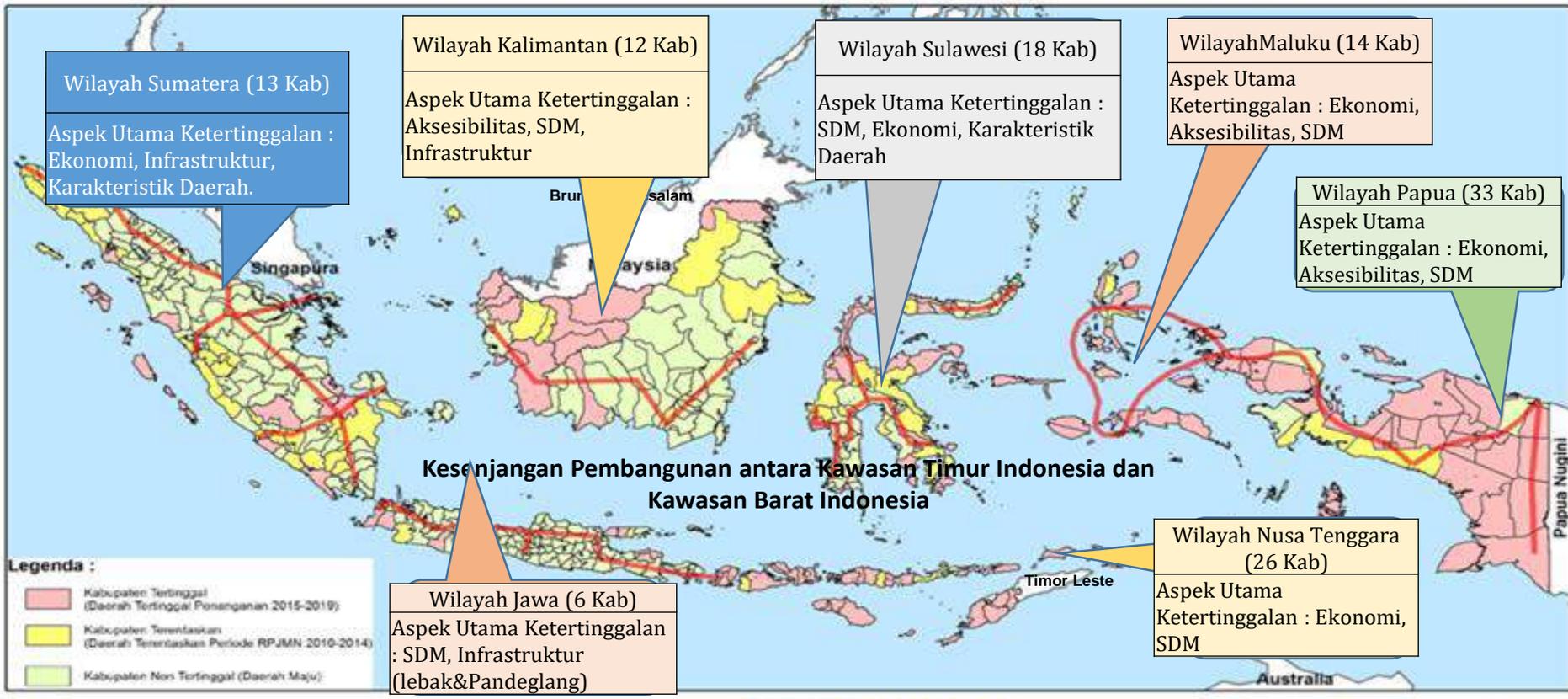
# SEBARAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL PER WILAYAH

## DAERAH TERTINGGAL

*“Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional” (PP78/2014)*

**Perpres 131 Tahun 2015  
Tentang Penetapan 122  
Daerah Tertinggal**

1. Sarpras
2. Sumber Daya Manusia
3. Kemampuan Keuangan Daerah
4. Ekonomi
5. Aksesibilitas
6. Karakteristik Daerah



# DATA 6 KRITERIA DAN 27 SUB INDIKATOR KETERTINGGALAN

Kriteria Utama	Indikator		Arah/ Tanda	Bobot		Sumber Data
				% Indikator	% Kriteria	
Ekonomi	1	Persentase Penduduk Miskin	+	10	20	Susenas
	2	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	-	10		Susenas
Sumber Daya Manusia (SDM)	3	Angka Harapan Hidup	-	10	20	Susenas
	4	Rata-rata Lama Sekolah	-	5		Susenas
	5	Angka Melek Huruf	-	5		Susenas
Infrastruktur	6	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Aspal/Beton	-	1.5	20	Podes
	7	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Diperkeras	-	1.5		Podes
	8	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Tanah	+	1.5		Podes
	9	Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Lainnya	+	1.5		Podes
	10	Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon	-	2		<u>Susenas</u>
	11	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	-	2		<u>Susenas</u>
	12	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	-	2		<u>Susenas</u>
	13	Persentase desa yg mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen	+	2		Podes
	14	Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan per 1000 Penduduk	-	2		Podes
	15	Jumlah Dokter per 1000 penduduk	-	2		Podes
16	Jumlah SD dan SMP per 1000 Penduduk	-	2	Podes		
Kapasitas Keuangan Daerah	17	Kemampuan Keuangan Daerah	-	10	10	Kemenkeu
Aksesabilitas	18	Rata-Rata jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi	+	6.67	20	Podes
	19	Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km	+	6.67		Podes
	20	Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar	+	6.67		Podes
Karakteristik Daerah	21	Persentase Desa Gempa Bumi	+	1.43	10	Podes
	22	Persentase Desa Tanah Longsor	+	1.43		Podes
	23	Persentase Desa Banjir	+	1.43		Podes
	24	Persentase Desa Bencana Lainnya	+	1.43		Podes
	25	Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung	+	1.43		Podes
	25	Persentase Desa Berlahan Kritis	+	1.43		Podes
	27	Persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir	+	1.43		Podes
				100	100	

**PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PROVINSI DAN WILAYAH PULAU TAHUN 2015-2019**

WILAYAH	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN/ KOTA	DAERAH TERTINGGAL	
			Jumlah	%
SUMATERA	Aceh	23	1	4.35
	Sumut	33	4	12.12
	Sumbar	19	3	15.79
	Sumsel	17	2	11.76
	Bengkulu	10	1	10.00
	Lampung	15	2	13.33
JAWA	Jatim	38	4	10.53
	Banten	8	2	25.00
KBI	<b>JUMLAH</b>		<b>19</b>	
NUSTRA	NTB	10	8	80.00
	NTT	22	18	81.82
KALIMANTAN	Kalbar	14	8	57.14
	Kalteng	14	1	7.14
	Kalsel	13	1	7.69
	Kaltara	4	2	50.00
SULAWESI	Sulsel	24	1	4.17
	Sulteng	11	9	81.82
	Sultra	14	3	21.43
	Gorontalo	6	3	50.00
	Sulbar	6	2	33.33
MALUKU	Maluku	11	8	72.73
	Maluku Utara	10	6	60.00
PAPUA	Papua Barat	13	7	53.85
	Papua	29	26	89.66
KTI	<b>JUMLAH</b>		<b>103</b>	
			<b>122</b>	

# EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

	MENINGKAT	TETAP	MENURUN	TIDAK BISA DIHITUNG	JUMLAH
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	122	-	0	-	122
TAHUN ANALISA: 2015	(100%)	-	(0%)	-	(100%)
PERTUMBUHAN EKONOMI	47	-	68	7	122
TAHUN ANALISA: 2014	(38,52)	-	(55,74%)	(5,74%)	(100%)
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	2	8	102	-	122
TAHUN ANALISA: 2014	(1,64)	(6,59%)	(91,80%)	-	(100%)

# TARGET PPDT RPJMN 2015 -2019 (REVISI)

Tahun/target		Rata-rata pertumbuhan ekonomi	Rata-rata persentase penduduk miskin	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		(%)	(%)	
(1)		(4)	(5)	(6)
2014 (baseline)		7,1	16.64	59
2015	Target	5,6-5,8	19,0	60,0
	Ralisasi			
2016	Target	6,0-6,2	17,5-18,0	61
	Ralisasi			
2017	Target	6,4-6,6	16,0-16,5	61
	Ralisasi			
2018	Target	6,7-6,8	15,5-16,0	62
	Ralisasi			
2019	Target	7.24	14.0	69.59**
	Ralisasi	6,9-7,1	15,0-15,5	62,78

# TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PPDT

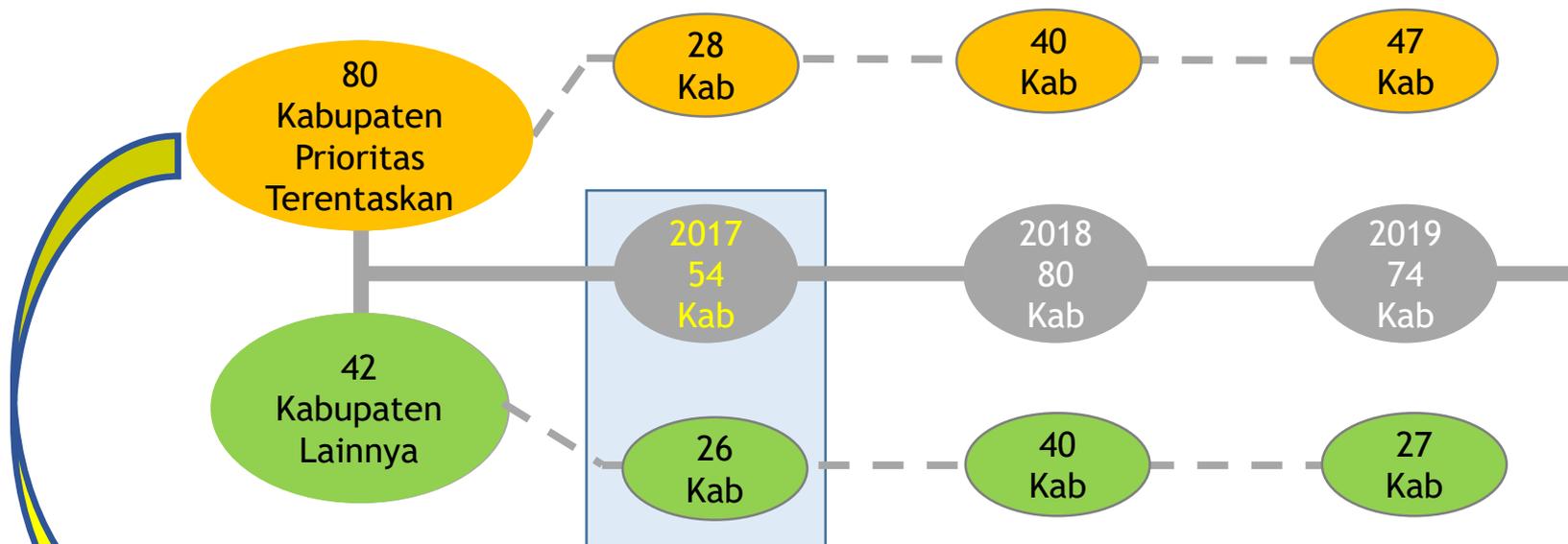
**Tujuan** Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah membangun sinergi dan sinkronisasi kebijakan serta program PPDT secara Nasional.

**Sasaran** dari Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah: (a) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9 sampai 7,1 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15 sampai 15,5 persen; (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 62,78; dan (d) berkurangnya kesenjangan antarwilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 kabupaten tertinggal.

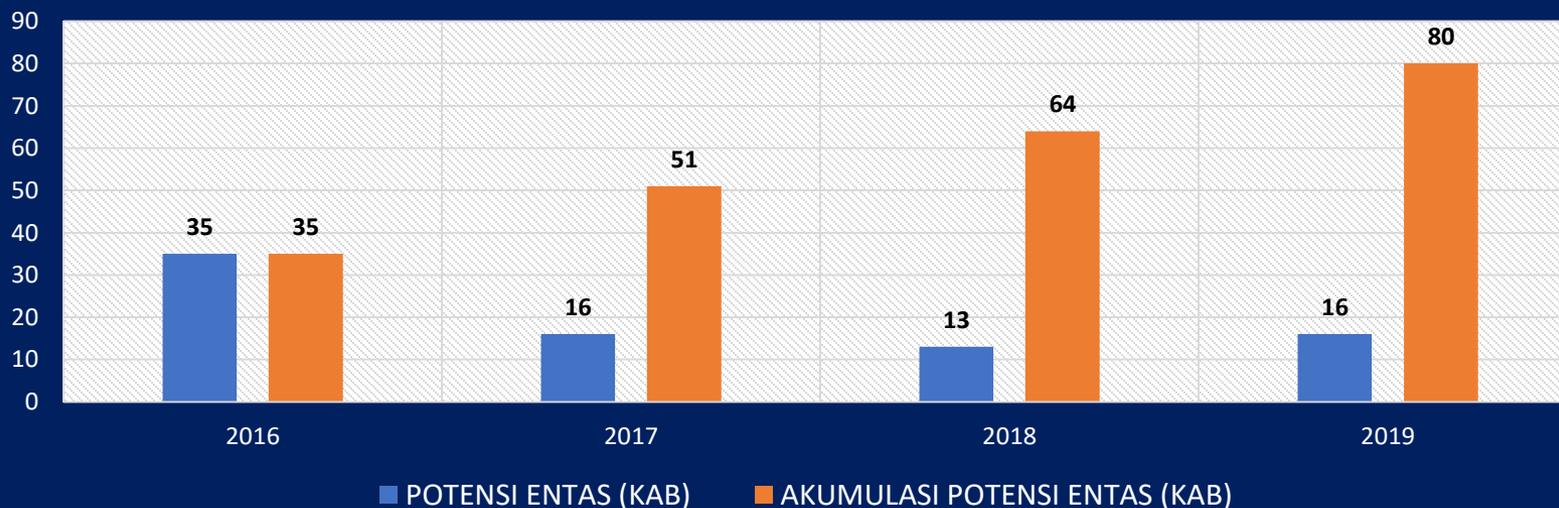
**Arah kebijakan** percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada:

- Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
- Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

# ROAD MAP PENANGANAN 122 DAERAH TERTINGGAL SAMPAI TAHUN 2019



## ROAD MAP KABUPATEN POTENSI ENTAS SAMPAI 2019



# INTERVENSI 54 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2017

BERDASARKAN PERPRES NO 45 TH 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TH 2017,  
TERDAPAT 54 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL YANG AKAN DIINTERVENSI PADA TAHUN 2017:

No	Kabupaten	Perekonomian Masyarakat	Sumber Daya Manusia	Sarana & Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	80 Kabupaten	42 Kabupaten
1	Nias Barat	√	√	√	√		√		√
2	Seluma	√	√		√			√	
3	Sampang	√	√		√			√	
4	Lombok Timur	√	√	√	√			√	
5	Bima	√	√	√	√		√	√	
6	Lombok Utara	√	√	√	√		√	√	
7	Sumba Timur	√	√	√	√	√	√		√
8	Kupang	√	√	√	√		√	√	
9	Timor Tengah Selatan	√	√	√	√	√	√		√
10	Belu	√	√	√	√		√	√	
11	Lembata	√	√		√		√	√	
12	Ende	√	√		√		√	√	
13	Manggarai	√	√	√	√		√	√	
14	Rote Ndao	√	√	√	√				√
15	Sumba Barat Daya	√	√	√	√				√
16	Nagekeo	√	√		√		√	√	
17	Sabu Raijua	√	√	√	√				√
18	Malaka	√	√	√	√		√	√	
19	Bengkayang			√	√			√	
20	Seruyan			√		√	√	√	
21	Mahakam Hulu					√	√	√	
22	Nunukan			√		√			√
23	Tojo Una-una	√	√		√		√	√	
24	Sigi	√	√	√	√	√	√	√	
25	Mamuju Tengah			√	√			√	

# INTERVENSI 54 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2017

No	Kabupaten	Perekonomian Masyarakat	Sumber Daya Manusia	Sarana & Prasarana	Kemampuan Keuangan Daerah	Aksesibilitas	Karakteristik Daerah	80 Kabupaten	42 Kabupaten
26	Maluku Tenggara Barat	√	√		√	√			√
27	Seram Bagian Timur	√	√	√	√	√	√		√
28	Maluku Barat Daya	√	√	√	√	√	√		√
29	Halmahera Barat	√	√	√	√		√	√	
30	Halmahera Timur	√	√		√	√	√	√	
31	Pulau Morotai	√	√		√		√	√	
32	Sorong Selatan	√	√		√	√	√	√	
33	Raja Ampat	√	√			√			√
34	Tambrauw	√	√		√	√			√
35	Jayawijaya	√	√	√		√			√
36	Paniai	√	√	√	√	√	√		√
37	Puncak Jaya	√	√	√		√			√
38	Boven Digoel	√	√			√			√
39	Mappi	√	√	√		√			√
40	Asmat	√	√	√		√	√		√
41	Yahukimo	√	√	√		√			√
42	Pegunungan Bintang	√	√	√		√			√
43	Tolikara	√	√	√		√			√
44	Sarmi	√	√			√		√	
45	Waropen	√	√		√	√	√		√
46	Mamberamo Raya	√	√			√			√
47	Nduga	√	√	√	√	√	√		√
48	Lanny Jaya	√	√	√		√			√
49	Mamberamo Tengah	√	√	√		√			√
50	Yalimo	√	√	√			√		√
51	Puncak	√	√	√		√			√
52	Dogiyai	√	√	√	√	√	√		√
53	Intan Jaya	√	√	√		√	√		√
54	Deiyai	√	√	√	√				√
<b>Jumlah</b>		<b>49</b>	<b>49</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>31</b>

**SINKRONISASI LINTAS SEKTOR PADA 5 LOKASI DAERAH TERTINGGAL TERINTEGRASI DALAM RKP 2017**

	<b>Lombok Timur</b>	<b>Sarmi</b>	<b>Morotai</b>	<b>MTB</b>	<b>Sabu Raijua</b>
Karakteristik Daerah	7 Pulau Kecil  Rawan Konflik  Rawan Bencana Transmigrasi	9 Pulau Kecil Terluar  Rawan Bencana  Rawan Pangan	Kawasan Perbatasan  6 Pulau Kecil Terluar  Rawan Bencana Rencana Trans/ Mina/ Agro/ Wisata 2018	Kawasan Perbatasan  4 Pulau Kecil Terluar (Masela, ...)  Rawan Pangan Rawan Bencana	Kawasan Perbatasan  2 Pulau Kecil  Rawan Pangan Rawan Bencana
Aspek utama ketertinggalan	Ekonomi SDM Infrastruktur	Ekonomi SDM Aksesibilitas	Ekonomi SDM	Ekonomi SDM Aksesibilitas	Ekonomi SDM Infrastruktur
Akar masalah penyebab ketertinggalan	Sulitnya mengakses Air Bersih di wilayah pesisir		Belum terhubungnya akses jalan dari Morotai Jaya dan Morotai Selatan Barat	Pabrik Rumput Laut belum beroperasi karena tidak ada akses air bersih	
Lokasi intervensi	Jerowaru, Keruak, Sembalun	Pantai Barat, Apawer Hulu, Pantai Timur Bagian Barat	Morotai Selatan barat & Morotai Jaya	Wuar Labubar Molu Maru Wer Maktian,	Sabu Liae, Sabu Tengah, Sabu Timur
Komoditas yang akan dikembangkan (Potensi)	(kelautan perikanan dan pariwisata)  Rumput laut	(perikanan dan kelapa dalam)	Rumput Laut Perikana Tangkap Wisata	Rumput Laut  Kelapa dalam	Garam  Rumput Laut
Pusat Pertumbuhan	KEK dan KSPN Mandalika	PKN Jayapura	KEK dan KSPN Morotai	Blok Masela	KSPN Nemberala-Rotendo
Integrasi antar sumber pendanaan	DAK Air Minum Pelatihan dan Bantuan Pasca Panen (Kemendes)	Pendampingan (Pemda & Kemendes)  Bantuan Alat Peningkatan Produksi (Kemendes)	Bantuan Pengelolaan Rumput Laut dan Perikanan Tangkap (Kemendes, KKP)	Bantuan pengelolaan Rumput laut (Kemendes) Pendampingan Nelayan (KKP & Pemda)	Bantuan Produksi Garam (Kemendes) Pendampingan Nelayan (KKP & Pemda)
Tindak Lanjut Apa yang akan dilakukan	Pemenuhan Air Bersih di Kec Jerowaru	Peningkatan kapasitas Produksi Minyak Kelapa Dalam	Pemenuhan Pelayanan Dasar di Wilayah Morotai bagian utara	Melanjutkan Pembangunan Pabrik Rumput Laut yang saat ini belum beroperasi	Peningkatan Produksi Garam

1. Pendekatan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan **Money Follow Program**.
2. Penguatan dilaksanakan dengan Pendekatan **Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial** dengan memperhatikan pada:
  - Pengendalian perencanaan
  - Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RAD
  - Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
  - Perkuatan integrasi sumber pendanaan
3. Perencanaan dan Penganggaran secara Holistik-Tematik Terintegrasi dalam rangka Pembangunan yang Berkualitas adalah Sangat Kritis untuk **Mencegah Total Lost** dalam Pembangunan



Social Cost



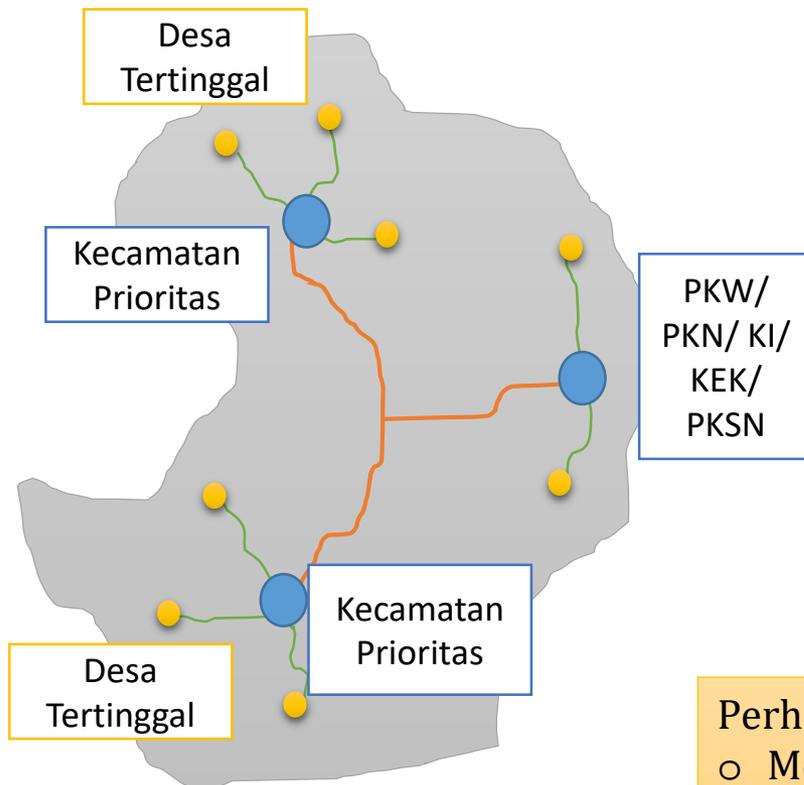
Economic Cost



Financial Cost

# SEKTOR UNGGULAN DAN KETERKAITAN WILAYAH

Sektor Unggulan dan Keterkaitan Wilayah menjelaskan tentang sektor unggulan daerah tertinggal dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tertinggal melalui peningkatan produktivitas di hulu dan percepatan industrialisasi/hilirisasi seperti pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta pengembangan potensi budaya, pariwisata dan keanekaragaman hayati.



## Penentuan Kecamatan Prioritas

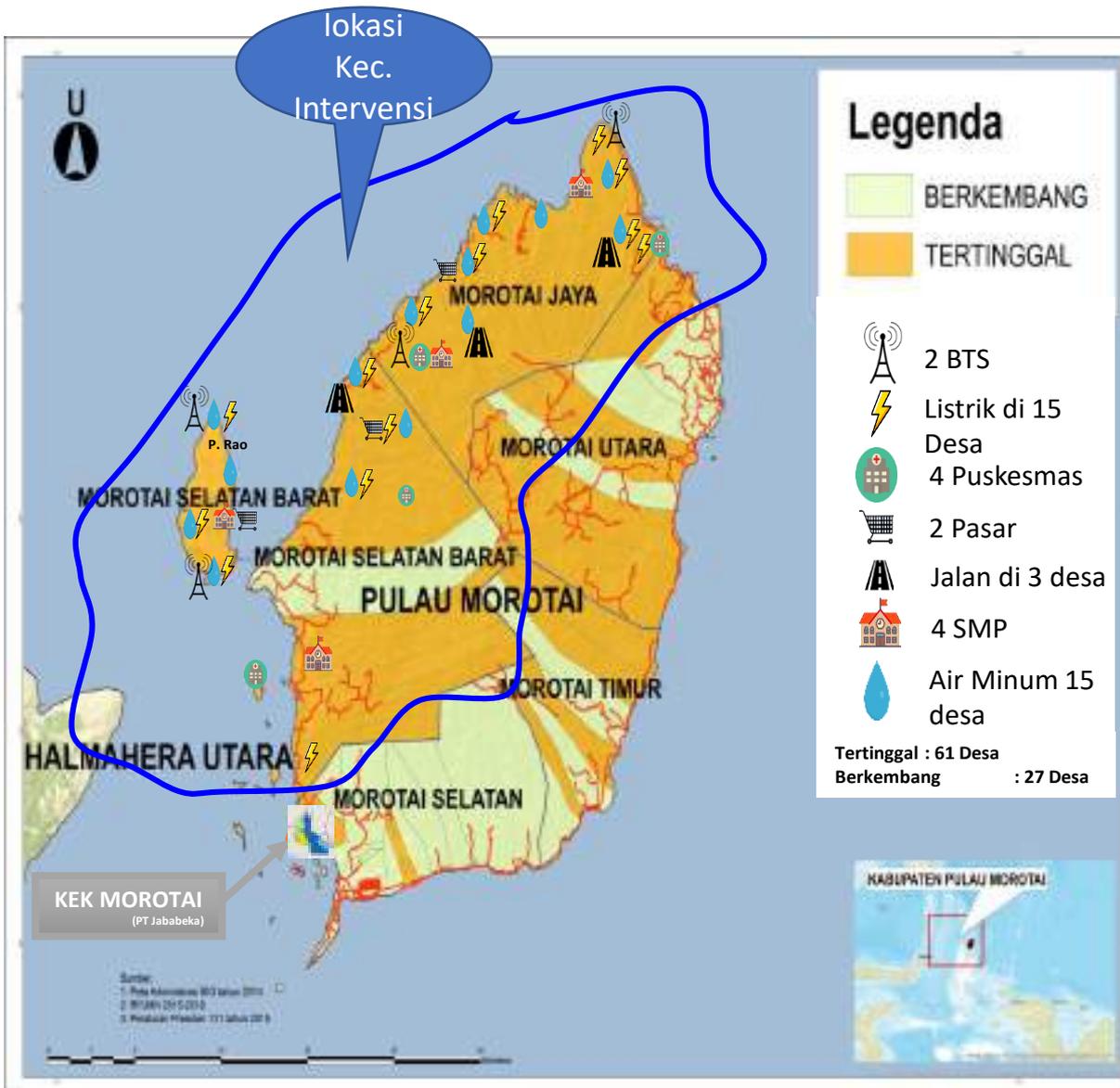
- Mayoritas merupakan **desa tertinggal**
- Memiliki **potensi unggulan** yang merepresentasikan sektor dinamis
- Secara geografis **berdekatan dengan pusat pertumbuhan**



Pengembangan industrialisasi berbasis sektor primer sesuai keunggulan daerah & sektor pariwisata

- Perhitungan kebutuhan pada kecamatan prioritas →
- Mengacu pada basis data IPD dengan capaian 0-2
  - Memetakan secara spatial untuk melihat aspek sebaran geografisnya

# CONTOH PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (KABUPATEN PULAU MOROTAI)



*Kecamatan Intervensi:*

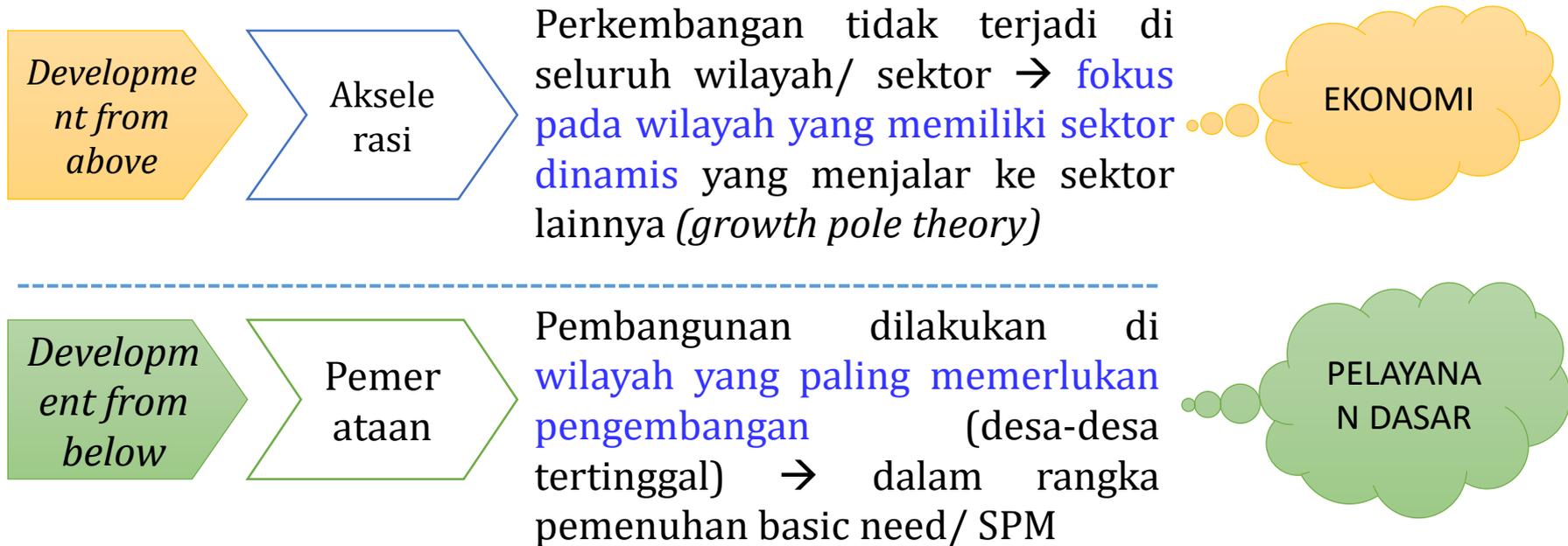
1. Morotai Selatan → pengembangan ekonomi lokal; aquaculture rumput laut dan perikanan darat
2. Morotai Jaya → pelayanan dasar
3. Morotai Selatan Barat → pelayanan dasar

No	Indikator	Rata-Rata Kabupaten	Rata-Rata Datin g	Rata-Rata Nasional
1	PDRB per Kapita (Rp Juta)	5,22		33,98
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,23	5,8	5,6
3	Pengeluaran Per Kapita per bulan (Rp ribu)	587,29	612,16	776,03
4	Penduduk Miskin (%)	8,74	20,9	14,3
5	Angka Melek Huruf (%)	94,08	82,87	94,14
6	Rata-rata lama Sekolah (tahun)	6,84	6,4	7,1
7	Angka Harapan Hidup (tahun)	65,78	65	67,9
8	IPM	66,08		73,81

Sumber: ATB ANS, PBDY, Maluku, 2015-2019

# PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- Merupakan **gabungan** antara konsep *development from above* dan *Development from below*



- Intervensi dilakukan secara **terfokus pada kawasan tertentu (bukan disebar ke seluruh wilayah)** yang memiliki **sektor dinamis** agar memberikan hasil yang signifikan dan **spillover effect** kepada wilayah sekitarnya khususnya desa-desa tertinggal

Contoh: Potensi unggulan P. Morotai adalah tuna di Kec Morotai Selatan, tapi merupakan kecamatan maju, maka diperlukan gabungan intervensi dimana untuk mempercepat aspek peningkatan ekonomi lokal diarahkan pada kecamatan yang mandiri sedangkan aspek pemenuhan pelayanan dasar diarahkan pada kecamatan yang masih memiliki banyak desa tertinggal seperti Kecamatan Morotai Jaya

# MATRIKS CASCADING PPDT

(Sebagai Kerangka Acuan Intervensi Dalam Pencapaian Target RPJMN Terkait PPDT)

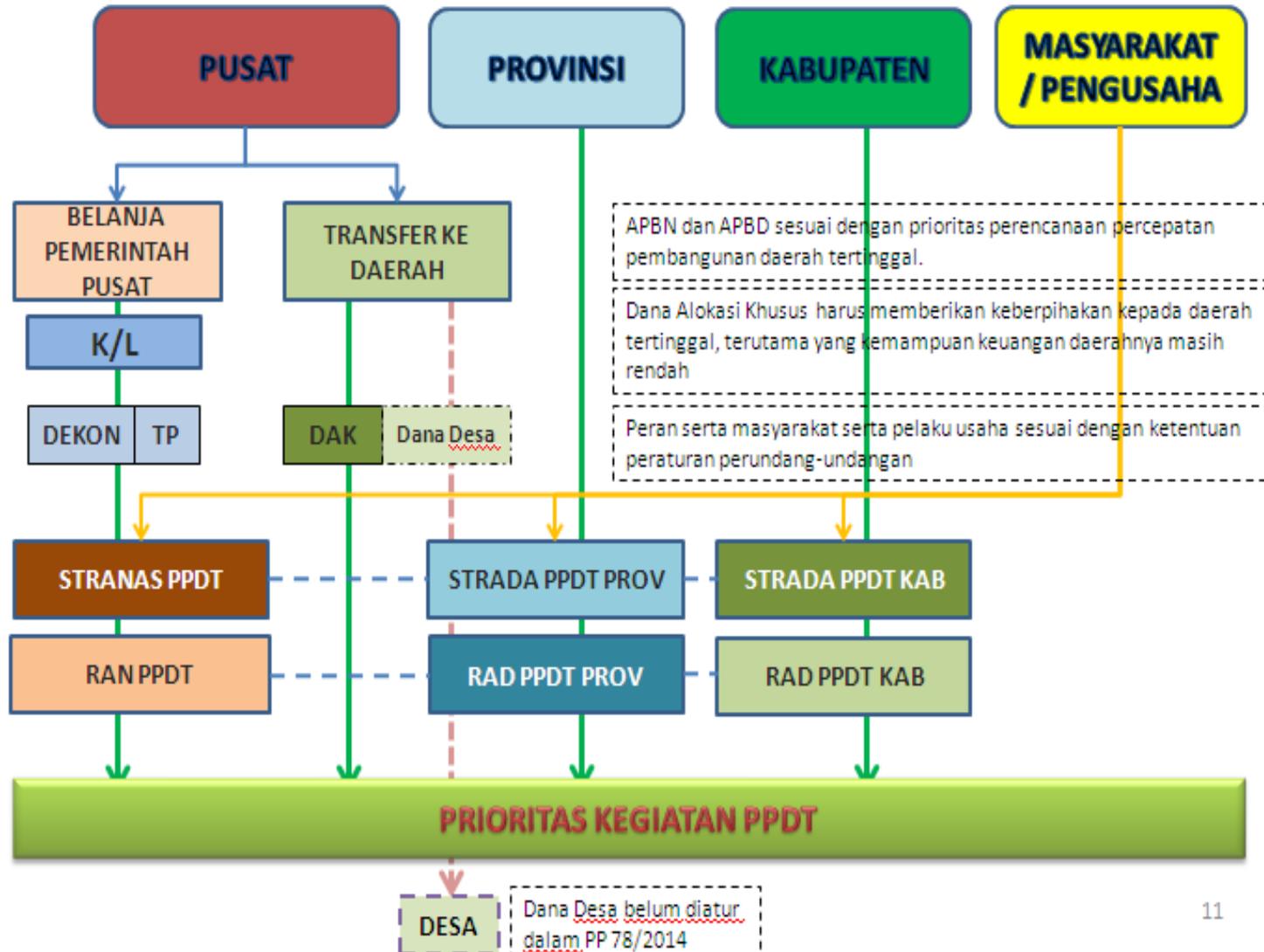
<i>INTERMEDIATE OUTCOME</i>	<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>	<i>OUTPUT/ PROGRAM</i>	<i>INPUT</i>	<i>PENANGGUNG JAWAB</i>
Kesehatan (Angka Harapan Hidup)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan per 1000 Penduduk	Puskesmas keliling	(Tanggung jawab kementerian/lembaga terkait	Kemendes PDPTT, Pemda, Desa
		elektrifikasi, energi baru dan terbarukan		Kemen ESDM, Kemendes PDPTT, Pemda.
		rumah dinas		Kemendes PDPTT, Pemda.
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi		KemennPUPR, Kemendes PDPTT, Pemda, Desa
	Jumlah Dokter, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Insentif Tenaga Kesehatan Afirmasi Nusantara Sehat di 3T		Kemendes PDPTT, Pemda,
Harapan Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah	Angka Partisipasi Sekolah	Pelaksanaan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C)		Kemendikbud, Pemda
	Rasio Guru Murid	Distribusi Tenaga pendidik		Kemendikbud, KemendesPDPTT
	Jarak Rata-rata Menuju Pelayanan Pendidikan Dasar	Pembangunan jalan menuju sarana pendidikan		KemennPUPR, Kemendes PDPTT, Pemda, Desa
-Peningkatan investasi (Peningkatan belanja modal daerah) -PDRB non-migas per kapita	Peningkatan persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen	-Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan		Kemendag, KemenKUKM, KemendesPDPTT, Pemda
	-Peningkatan persentase desa dengan ketersediaan jalan memadai	-Pembangunan, peningkatan kapasitas jalan/jembatan		KemenPUPR, KemendesPDPTT, Pemda
		-Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi		Kemenkominfo, KemendesPDPTT, Pemda
		-Pembangunan dermaga/pelabuhan/bandara		KemenPUPR, KemendesPDPTT, Kemenhub, Pemda

## Matriks Cascading PPDT

**(Sebagai Kerangka Acuan Intervensi Dalam Pencapaian Target RPJMN Terkait PPDT)**

<i>INTERMEDIATE OUTCOME</i>	<i>IMMEDIATE OUTCOME</i>	<i>OUTPUT/ PROGRAM</i>	<i>INPUT</i>	<i>PENANGGUNG JAWAB</i>
Peningkatan Belanja Makanan dan Non Makanan per Kapita	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	- Pengembangan produk unggulan kabupaten/desa	(Tanggung jawab kementerian/lembaga terkait	KemenKUKM, KKP, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemensos, kemendes PDTT, Pemda
		Pengembangan usaha dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin		KemenKUKM, KKP, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemensos, kemendes PDTT, Pemda, LSM
		Pembangunan KUKM/BUMDesa dan lembaga ekonomi lainnya untuk meningkatkan akses permodalan, usaha, dan pasar bagi masyarakat desa		KemenKUKM, KKP, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemensos, kemendes PDTT, Pemda, LSM
		Peningkatan kapasitas petani dan nelayan dalam pemanfaatan sumber daya		KemenKUKM, KKP, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemensos, kemendes PDTT, Pemda, LSM
		Pengembangan home industri		KemenKUKM, KKP, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemensos, kemendes PDTT, Pemda, LSM
		- Pembangunan Embung - Penyediaan sarpras pasca panen		Kementan, KemendesPDTT, KemenkoPMK
		- Promosi dan kemitraan UMKM - Pembangunan ruang publik (sarana olah raga desa) untuk meningkatkan interaksi sosial ekonomi		KemenKUKM, KKP, Kemendag, Kementan, KKP, Kemenperin, Kemensos, kemendes PDTT, Pemda, LSM
		Distribusi KIP		Kemenko PMK, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes PDTT
		Peningkatan persentase rumah tangga pengguna utilitas (listrik dan air)	Pembangunan energi listrik dan air	

## SKEMA PENDANAAN



# RANCANGAN TEMA RKP 2018

## TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018

- Memperbaiki **Kualitas Belanja**.
- Peningkatan **iklim usaha dan iklim investasi** yang lebih kondusif
- Peningkatan **daya saing** dan **nilai tambah** industri
- Peningkatan **peran swasta** dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur



**Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional**



**Peningkatan Kualitas *Money Follow Program* dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial**

RKP 2015*)	RKP 2016	RKP 2017	RKP 2018	RKP 2019
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas	Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah	<b>MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN</b>	<i>Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019</i>

# PENAJAMAN PRIORITAS NASIONAL

URAIAN	RKP 2017	RANCANGAN RKP 2018
Prioritas Nasional	23	10
Program Prioritas	88	30

9. PEMBANGUNAN WILAYAH

22. PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL  
23. PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Prioritas yang semakin tajam menjadi dasar dari upaya penajaman alokasi anggaran pembangunan
- Disamping itu disusun pula skala prioritas dari masing-masing program prioritas yang akan digunakan jika terdapat kenaikan/penurunan anggaran

# RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS 2018: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

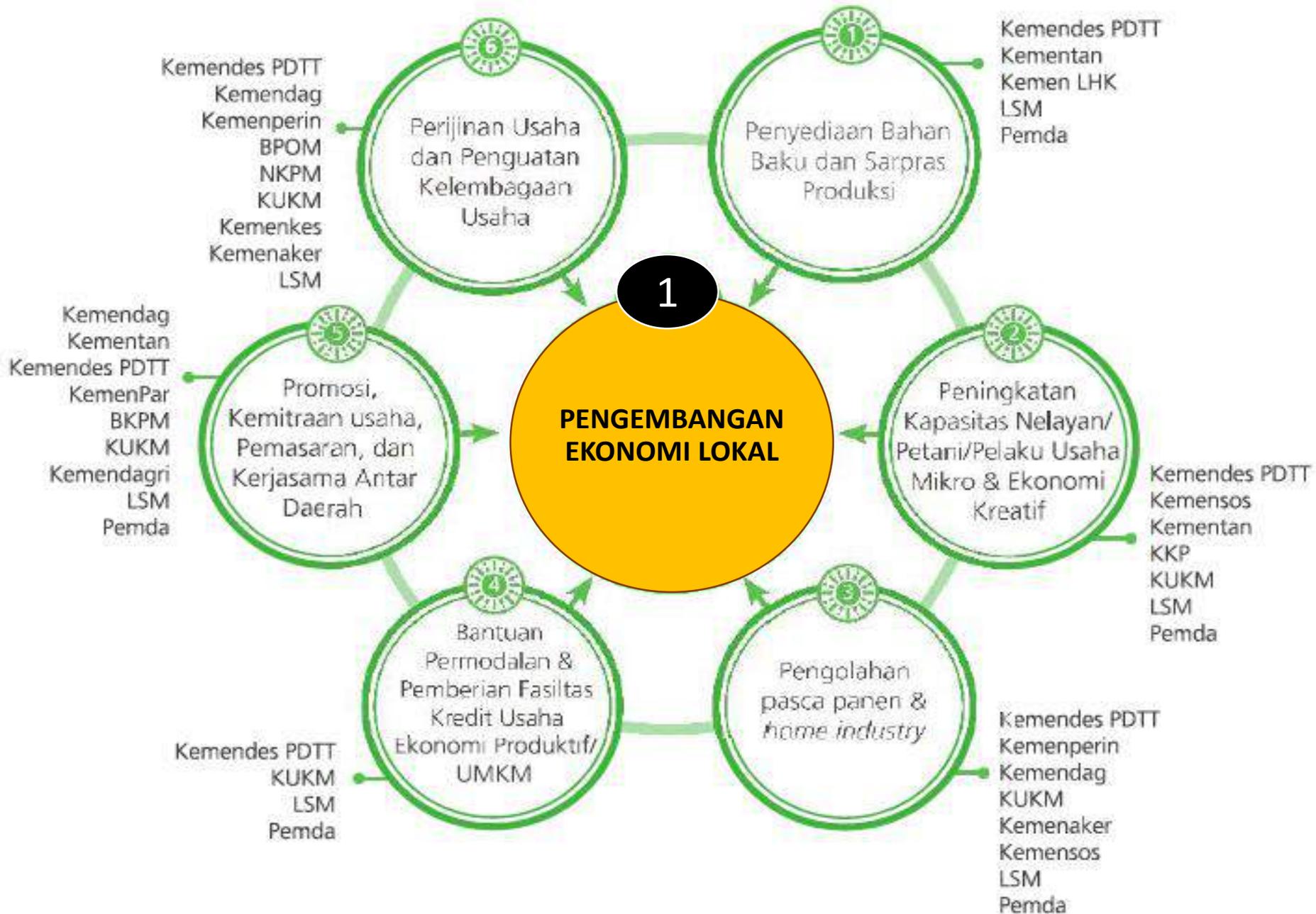
## PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
<p>Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara</p>	<p>Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara</p>	<p>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara</p>	<p>Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas</p>	<p>Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan</p>
PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
<p>Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan &amp; jembatan</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih</p>	<p>Distribusi tenaga pendidik</p>	<p>Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi</p>	<p>Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN</p>	<p>Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan</p>
<p>Pembangunan dermaga</p>	<p>Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru</p>	<p>Distribusi tenaga kesehatan</p>	<p>Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif</p>	<p>Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah</p>	<p>Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan</p>
<p>Pembangunan dan rehabilitasi bandara</p>	<p>Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah</p>	<p>Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda</p>	<p>Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen</p>	<p>Penyelesaian Segmen Batas</p>	<p>Kerjasama Multilateral</p>
<p>Pelayanan angkutan keperintisan</p>	<p>Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu</p>	<p>Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha</p>	<p>Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM</p>	<p>Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan</p>	<p>Regulasi Eksport Import</p>
<p>Penyediaan Akses Telekomunikasi</p>	<p>Pengadaan alat kesehatan</p>		<p>Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal</p>	<p>Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu</p>	<p>Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan</p>
<p>Penyediaan Moda Transportasi</p>	<p>Penyediaan akses ketenagalistrikan</p>		<p>Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha</p>		<p>Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan</p>
<p>Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara</p>					<p>Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan</p>
				<p style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px;">Urusan Wajib dan Kewenangan Pemerintah Pusat</p>	

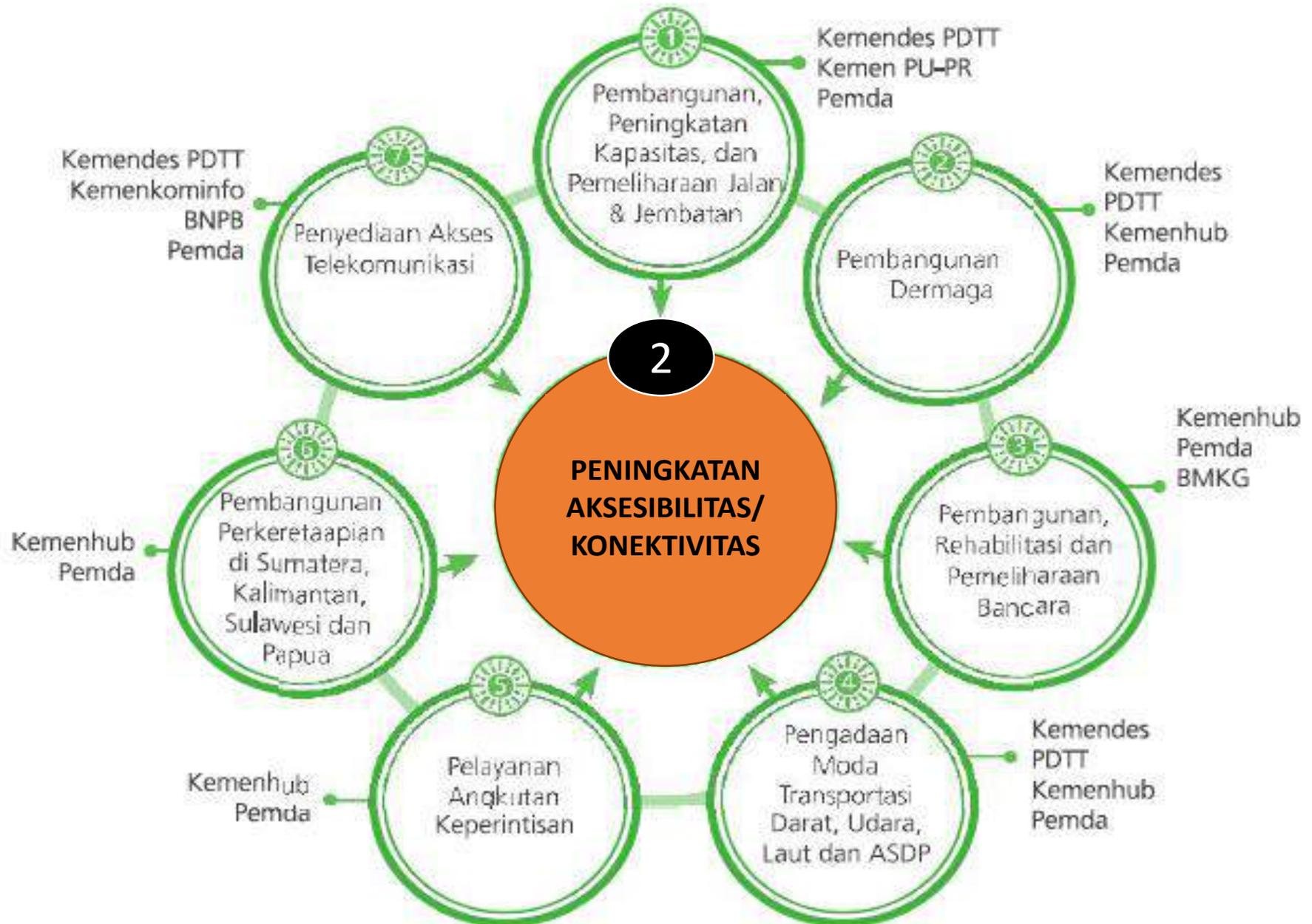
# PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL



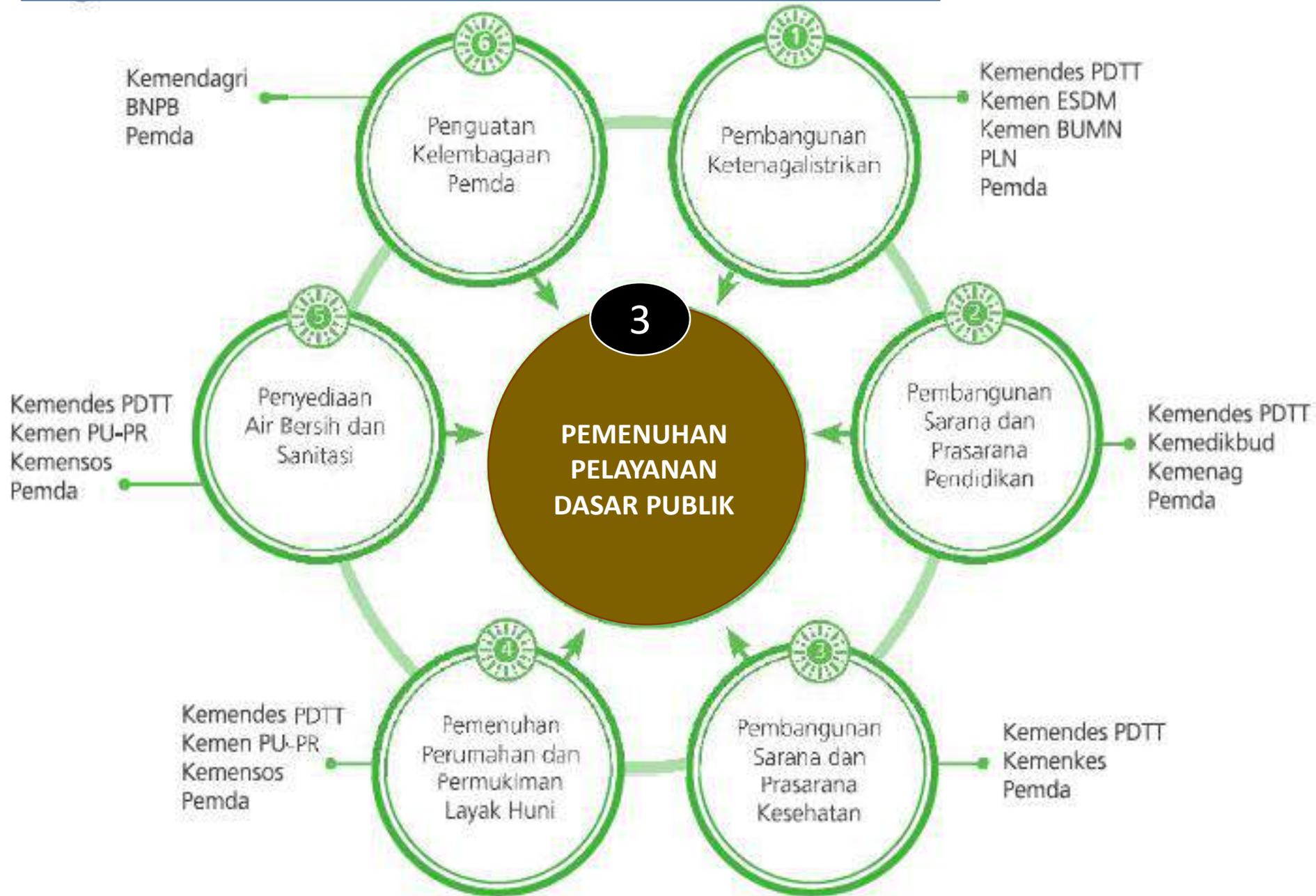
# KEGIATAN PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL



# KEGIATAN PRIORITAS PENINGKATAN AKSESIBILITAS



# KEGIATAN PRIORITAS PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK



# KEGIATAN PENINGKATAN SDM DAN IPTEK



# Bentuk Kegiatan Ditjen PDT-KemendesPDTT

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal	
A	Peningkatan Kualitas Sarana Pendidikan Dasar Bantuan Sarana Pendidikan Bangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) di Daerah Tertinggal
B	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Daerah Tertinggal
C	Bantuan Sarana Olahraga Berupa Lapangan Sepak Bola di Daerah Tertinggal
D	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat di Daerah Tertinggal
E	Bantuan Sarana Olahraga dan Pertemuan Beserta Peralatan Olahraga untuk di Daerah Tertinggal
F	Pembangunan Model Embung dengan Teknologi Water Treatment Plant (WTP)

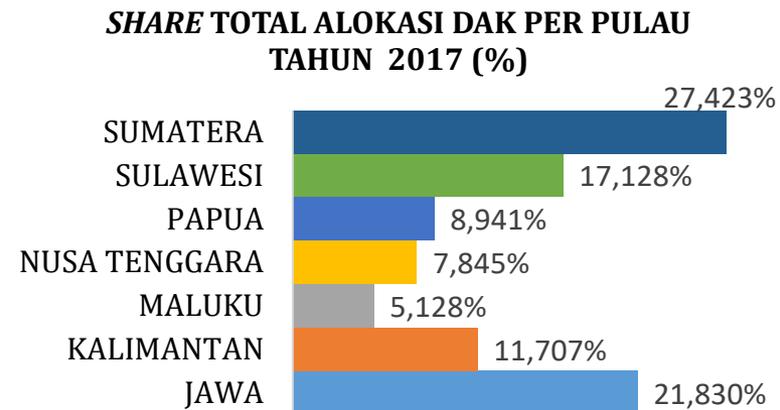
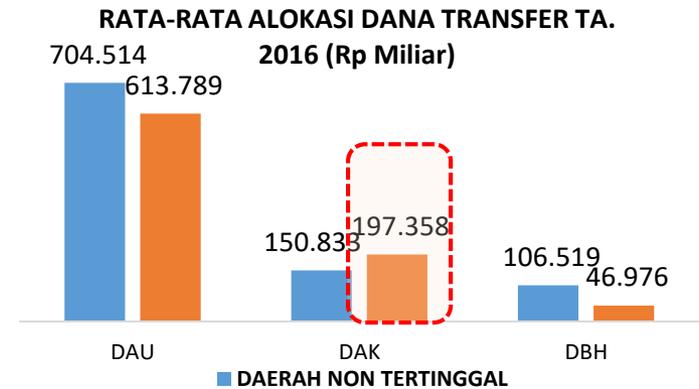
Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal	
A	Pengembangan Fasilitas Home Stay, Wisata Kuliner dan Wisata Buatan sebagai Daya Tarik Pariwisata di Daerah Tertinggal.
B	Pengadaan Air Bersih Pendukung Pariwisata di Daerah Tertinggal
C	Rehabilitasi Terumbu Karang Dalam Mendukung Pariwisata di Daerah Tertinggal
D	Bantuan Bahan dan Peralatan Peningkatan Hasil Produksi Komuditas Produk Unggulan dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan
E	Reboisasi pada Daerah Resapan Air di Sekitar Embung
F	Bantuan Pemanfaatan Sumber Daya Air di Daerah Tertinggal

## Bentuk Kegiatan Ditjen PDT-KemendesPDTT

	<b>Peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal</b>
<b>A</b>	Pembangunan embung.
<b>B</b>	Peningkatan pembelajaran ruang publik terbuka di daerah tertinggal
<b>C</b>	Pembangunan sarana air bersih
<b>D</b>	Pembangunan pasar kecamatan
<b>E</b>	Pembangunan sarana informasi pendukung produk unggulan
<b>F</b>	Pembangunan jalan strategis
<b>G</b>	Pembangunan jembatan penyeberangan
	<b>Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal</b>
<b>A</b>	Bantuan Perikanan Tangkap Berupa Alat Tangkap Ikan
<b>B</b>	Bantuan Mesin Pengolahan Garam
<b>C</b>	Bantuan Mesin Pengolahan Rumput Laut
<b>D</b>	Bantuan Mesin Perontok Jagung
<b>E</b>	Bantuan Alat Pasca Panen Berupa Combine Harvester Dan Dryer
<b>F</b>	Bantuan Mesin Pengolahan Pasca Panen Kopi
<b>G</b>	Peningkatan Sentra UKM Berbasis Bumdes Daerah Tertinggal
<b>H</b>	Bantuan Pengolahan Minyak Kelapa

# PERAN DAK DI DAERAH TERTINGGAL

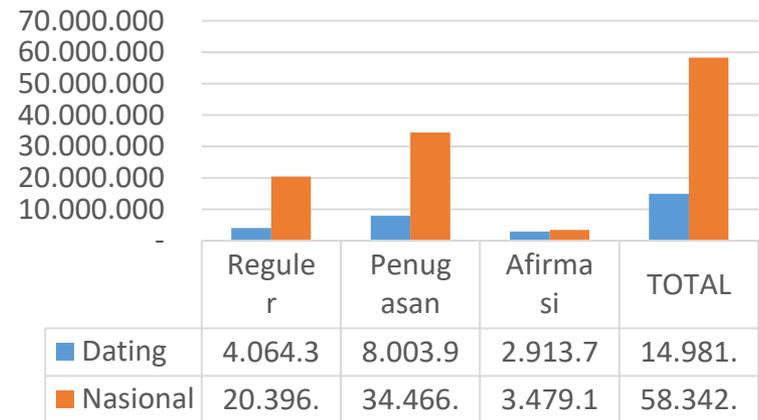
- Spirit DAK: instrumen anggaran untuk **mempercepat pembangunan** di daerah yang berkapasitas fiskal rendah, terutama di **daerah tertinggal dan perbatasan**.
- Rata-rata alokasi DAK antara Daerah Tertinggal sudah lebih besar dari Daerah Non Tertinggal tetapi tidak signifikan. Seharusnya Daerah Tertinggal mendapatkan alokasi DAK yang signifikan lebih besar.
- DAK diharapkan fokus untuk memenuhi **pelayanan dasar** di daerah tertinggal sehingga mencapai SPM, serta meningkatkan **aksesibilitas menuju pusat perekonomian**.



# KEBIJAKAN DAN ALOKASI DAK 2017



ALOKASI DAK TA. 2017 (Rp Juta)



**TOTAL DAK DAERAH TERTINGGAL= 14,9 T**

- Alokasi DAK Reguler di Daerah Tertinggal hanya 19,93% dari DAK Reguler Nasional. Hal ini belum memenuhi spirit DAK untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal.
- **Ditjen PDT diharapkan berperan strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan Alokasi DAK Rp 14,9 T untuk mendukung percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**

# PERAN KEMEN DESA PDTT DALAM MENGAWAL DAK 2018



\*Ket: Perubahan dari tahun 2017 font warna biru

4. Khusus untuk DAK Afirmasi, perencanaan perlu memperhatikan **KEBUTUHAN SPESIFIK BERBASIS KARAKTERISTIK DAERAH.**

1. Melakukan **PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN** agar sesuai dengan kebutuhan prioritas di daerah tertinggal (Dit. Perinden dan Dit. Sarpras).
2. Terhadap K/L → Menyampaikan **DATA DAN INFORMASI KEBUTUHAN PRIORITAS** pembangunan daerah tertinggal kepada Bappenas dan K/L teknis terkait (*by name by address*).
3. Terhadap Pemda → **MENGKOORDINASIKAN DAERAH** agar menyusun proposal DAK yang sesuai kebutuhan daerah tertinggal (asistensi penyusunan proposal DAK).



**TERIMA KASIH**